

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG PERTANIAN OLEH PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN (PPL) WILAYAH BINAAN DESA BUNISEURI KECAMATAN CIPAKU KABUPATEN CIAMIS

Engkus Kusmana ¹, Regi Refian Garis ²
Universitas Galuh, Ciamis Indonesia ¹⁾²⁾

E-mail: regirefiangaris@gmail.com

ABSTRAK

Pemberdayaan Masyarakat di bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis secara umum sudah berjalan, namun belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dikategorikan belum optimal. Berbagai Indikator menyatakan diantaranya PPL harus mengoptimalkan perannya sebagai penyuluh untuk memberikan motivasi, merangsang, dan memperluas wawasan petani terhadap perkembangan dunia luar. PPL mengajarkan petani agar terampil mengerjakan materi yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan. Hambatan yang dihadapi yaitu belum optimalnya peran dan fungsi PPL melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola. Lahan pertanian (sawah) tadah hujan dan sarana prasarana pengairan yang belum memadai menjadikan Desa Buniseuri belum bisa mengoptimalkan lahan pertanian. Pemerintah Desa, BPP (Balai Penyuluh Pertanian), UPTD Pendidikan, PKM (Pusat Kesehatan Masyarakat), UPTD P2KBP3A, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Indikator keberhasilan PPL salah satunya adalah adanya kelompok tani. Adanya kelompok tani sangat penting untuk meringankan tugas PPL. Upaya yang dilakukan diantaranya: untuk mewujudkan pertanian yang tangguh diperlukan sumberdaya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan perkebunan) Transfer teknologi pembuatan pupuk kompos memberikan manfaat yang besar yaitu adanya peningkatan pengetahuan warga tentang manfaat bahan sisa sampah organik sebagai bahan baku pembuatan pupuk kompos.

Kata Kunci: *Pemberdayaan, Pupuk, Organik, Masyarakat*

PENDAHULUAN

Di era globalisasi seperti sekarang ini setiap Negara dituntut untuk menjadikan kondisi kehidupan ekonominya menjadi semakin efektif, efisien, dan kompetitif. Indonesia

merupakan Negara berkembang yang terus mengupayakan pembangunan. Pembangunan (Desa) adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Tujuan

dari pembangunan adalah untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan inovasi di dalam masyarakat tersebut. Strategi pembangunan di Indonesia dimulai dengan peningkatan pemerataan pembangunan di daerah perdesaan. Masyarakat sebagai subyek pembangunan harus memiliki kesadaran untuk memperbaiki kehidupannya menjadi lebih baik dan keluar dari jerat kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah dan masyarakat perlu mengentaskan kemiskinan dalam meraih kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 beserta batang tubuhnya.

Dalam upaya pemberdayaan, masyarakat desa setempat harus lebih banyak terlibat dalam kegiatan tersebut. Karena masyarakatnya lebih mengetahui potensi dan kondisi desanya. Pemerintah hanya bertindak sebagai fasilitator yang mendukung program pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, karena yang menjadi subyek dari pemberdayaan adalah masyarakat desa itu sendiri. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam undang-undang tersebut Pasal 18 yang menyatakan bahwa desa mempunyai kewenangan dalam pembangunan melalui kewenangan yang dimilikinya.

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang memerlukan waktu dan tindakan nyata secara bertahap dan

berkesinambungan dalam meningkatkan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan petani diarahkan dari mulai proses produksi, pemeliharaan, panen, pasca panen, serta pemasaran. Pemberdayaan petani ini diarahkan pada usaha pertanian.

Penyuluh Pertanian adalah proses pendidikan nonformal bagi petani nelayan beserta keluarganya agar berkemampuan meningkatkan produksi dan produktivitas usaha tani, produktivitas kerja serta kemandirian dalam usaha tani yang berkelanjutan sehingga akan meningkatkan kesejahteraan petani nelayan beserta keluarganya yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas hidupnya.

Penyuluh Pertanian bertujuan untuk merubah perilaku para petani menjadi petani yang berperilaku profesional dalam berusaha tani sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dalam masyarakatnya.

Namun dari hasil observasi yang penulis lakukan, diketahui bahwa Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri di pandang masih belum dilaksanakan dengan optimal. Hal tersebut diduga disebabkan oleh beberapa indikator antara lain sebagai berikut:

1. PPL kurang memberikan penyadaran atau sosialisasi kepada masyarakat, tentang pentingnya pertanian.
2. PPL kurang memberikan kemampuan kepada petani dalam

meningkatkan produktivitas usaha tani (termasuk hasil panen) dengan memberikan rekomendasi yang tepat dalam memanfaatkan lahan pertanian secara optimal.

3. PPL kurang memberikan motivasi dan arahan untuk perbaikan kelembagaan petani (kelompok tani) dalam kegiatan pertanian

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang menggambarkan keadaan yang terjadi pada saat penelitian sedang berlangsung yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan data dan menyusunnya dalam suatu klasifikasi tertentu kemudian menganalisis data dan menyimpulkan hasil penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan dengan cara :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Pemberdayaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat dikatakan bahwa : kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak : bangsa yang tidak bersatu tidak akan bisa untuk menghadapi agresi dari luar ; 2 kekuatan ; tenaga (yang menyebabkan sesuatu bergerak dan sebagainya) ; 3 muslihat : ia melakukan segala tipu untuk mencapai

maksudnya ; 4 akal; ikhtiar ; upaya : ia berusaha dengan segala yang ada padanya ;

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 12 yang dimaksud Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Selanjutnya Sulistiyani, (2017:77-78) memberikan pengertian tentang pemberdayaan masyarakat yaitu :

Secara etimologis pemberdayaan berasal pada kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh daya/kekuatan/ kemampuan, dan atau proses pemberian daya/ kekuatan/ kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau berdaya.

Pengertian “Proses” menunjuk pada serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan secara kronologis sistematis yang mencerminkan pertahapan upaya mengubah masyarakat yang kurang atau belum berdaya menuju keberdayaan. Proses akan merujuk pada suatu tindakan nyata yang

dilakukan secara bertahap untuk mengubah kondisi masyarakat yang lemah, baik knowledge, attitude, maupun practice (KAP) menuju pada penguasaan pengetahuan, sikap-perilaku sadar dan kecakapan-keterampilan yang baik.

Makna “memperoleh” daya/kekuatan/kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta kepada pihak lain untuk memberikan daya/kekuatan/kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ketidakberdayaan/tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/kemampuan/kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Inisiatif itu untuk mengalihkan daya/kemampuan/kekuatan adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan. Misalnya pemerintah atau agen-agen pembangunan lain.

2. Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Setiawan (2011:27) tujuan pemberdayaan adalah mencari langkah

berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat tak berdaya sehingga mereka memiliki kemampuan otonom mengelola seluruh potensi sumberdaya yang dimilikinya.

3. Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

1. Axinn (1988), (Mardikanto, Soebianto 2017:159) mengartikan “pendekatan” sebagai suatu “gaya” yang harus menentukan dan harus diikuti oleh semua pihak dalam sistem yang bersangkutan (the style of action within a system). “Pendekatan” ibarat bunyi kendang yang harus diikuti penabuh gamelan dan penarinya.

4. Prinsip dan Dasar Pemberdayaan Masyarakat

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sutrisno (2005:18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (bottom up approach): pada kondisi ini pengelolaan dan para stakeholder setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.
2. Partisipasi (participation): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan.
3. Konsep keberlanjutan: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan

berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi.

4. Keterpaduan: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional.
5. Keuntungan sosial dan ekonomi: merupakan bagian dari program pengelolaan.

5. Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Suharto (2006:59) mengemukakan pendapat mengenai proses dan upaya pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan.

6. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Adimihardja dan Harry (2001:15) mengemukakan:

Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat)'. dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: Participatory Rural Appraisal (PRA).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri

Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PPL secara umum sudah dikategorikan dilaksanakan dengan optimal, artinya bahwa Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh PPL sudah sesuai dengan pendapat Sulistiyani (2017:83) mengenai proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap.

Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan membutuhkan peningkatan kapasitas diri.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, sebagian masyarakat sudah biasa melakukan penyuluhan pertanian yang dilakukan oleh PPL dengan jadwal secara periodik menemui petani di lapangan baik penyuluhan bersifat umum maupun penyuluhan tentang pertemuan kelompok yang dilakukan di lapangan dan di Kampung KB dengan penekanan kepada pemberdayaan pertanian dengan cara memberikan penyadaran untuk merubah perilaku, sikap dan keterampilan petani.

Untuk memanfaatkan lahan kosong dan lahan tidur atau petani yang tidak mempunyai lahan yang luas untuk menanam tanaman di polybag dantidak menanam satu jenis tanaman saja yang mengandalkan keberadaan air.

Menurut Setiawan (2011:27) menyatakan bahwa ;

Tujuan pemberdayaan adalah mencari langkah berkelanjutan untuk

meningkatkan kapasitas masyarakat tak berdaya sehingga mereka memiliki kemampuan otonom mengelola seluruh potensi sumberdaya yang dimilikinya.

Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa PPL melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang tata cara pengelolaan lahan pertanian yang benar telah bekerja optimal dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan penggalan potensi desa. Dalam praktek lapangan PPL dan petani membuat bidang hamparan yang dijadikan percontohan penggarapan, jenis benih, cara pemupukan, cara pemeliharaan dan penanggulangan hama. Untuk menjaga agar kegiatan berkesinambungan PPL memberikan penyuluhan melalui Sekolah Lapangan yang didalamnya dipelajari dari awal persiapan lahan sampai tahapan panen dan pasca panen.

Dalam meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengelolaan tanaman pertanian dinilai cukup baik melalui kelompok tani, Untuk menyampaikan program-program yang baru atau program-program yang belum diketahui petani, PPL dibantu oleh Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), contohnya dalam penanaman padi dengan sistem jajar legowo.

PPL dalam membantu masyarakat desa untuk mengoptimalkan lahan pekarangan

untuk bercocok tanam telah berjalan optimal dengan membuat apotek hidup (tanaman obat-obatan), warung hidup (tanaman sayur-sayuran, tomat dan bawang, cabai), lumbung hidup (tanaman palawija) dan bank hidup (tanaman buah-buahan) dengan media tanam pot dan polybag disetiap keluarganya membantu kehidupan sehari-hari.

Adimihardja dan Harry (2001:15) mengemukakan:

Konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat)'. dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: Participatory Rural Appraisal (PRA).

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa salah satu keberhasilan Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan, sesuai dengan salah satu tujuan khusus dari pemberdayaan, ialah meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.

Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan

kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis, pemerintah telah memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk membentuk kelompok taniagar petani dalam kegiatannya terorganisirakan mempermudah petani untuk mendapatkan bantuan pemerintah. PPL melihat wilayah untuk dimungkinkan terbentuknya kelompok, pengorganisasian, mengembangkan komoditi, untuk lebih memudahkan dalam penyuluhan, rencana kerja dan tujuan akhir kelompok.

Dalam hal memberikan keterampilan dalam pembuatan pupuk buatan PPL pernah memberikan keterampilan pembuatan pupuk buatan melalui praktek di lapangan. PPL dengan memanfaatkan kotoran sapi membuat kompos, pembuatan pupuk buatan cair. Dalam pembuatan kompos PPL membawa campuran seperti M-Bio dan M4 dan bahan hijauan disediakan oleh petani.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa di dalam tahapan peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh informan, PPL dalam memberikan pemahaman mengenai terbentuknya kelompok tani telah melakukan peningkatan kemampuan Gapoktan yang dimaksudkan agar berfungsi sebagai unit usahatani, unit

usaha pengolahan, unit usaha sarana dan prasarana produksi, unit jasa penunjang lainnya, sehingga menjadi organisasi petani yang kuat dan mandiri.

Menurut Suharto (1997:218-219), pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal.

Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah.

Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya.

Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dalam memberikan keterampilan dalam pembuatan pupuk buatan untuk hasil pertanian yang lebih baik, PPL

telah bekerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pupuk organik sangat bermanfaat bagi peningkatan produksi pertanian baik kualitas maupun kuantitas, mengurangi pencemaran lingkungan, dan meningkatkan kualitas lahan secara berkelanjutan. Penggunaan pupuk organik dalam jangka panjang dapat meningkatkan produktivitas lahan dan dapat mencegah degradasi lahan.

2. Hambatan-hambatan dari Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan-hambatan dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh PPL pada tahap-tahap pemberdayaan.

PPL menemui hambatan yang dapat terlihat dari kurang antusiasnya masyarakat Desa Buniseuri dalam bidang pertanian, sarana penunjang seperti sumber air kurang (sawah tadah hujan), kegiatan tidak berkelanjutan, tidak adanya program dari institusi pertanian dan SDM petani tidak ada regenerasi.

Dalam memberikan penyadaran kepada masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pertanian, PPL menemui hambatan tidak konsistennya masyarakat (tidak berkelanjutan) dalam bertani dan kekurangan suplai benih. Di lahan sawah, masyarakat enggan mengganti tanaman padi dengan tanaman lain. Dalam manajemen

POAC tidak jalan, terutama bagian control dan SDM petani tidak ada regenerasi, karena petani yang ada sudah tidak produktif.

Menurut Mardikanto, Soebianto (2017:161-162) Pendekatan pemberdayaan dapat pula diformulasikan dengan mengacu kepada landasan filosofi dan prinsip-prinsip pemberdayaan, yaitu :

1. Pendekatan partisipatif, yang mencakup :
 - a. Pemberdayaan selalu bertujuan untuk pemecahan masalah masyarakat, bukan untuk mencapai tujuan-tujuan “orang luar” atau penguasa;
 - b. Pilihan kegiatan, metoda maupun teknik pemberdayaan, maupun teknologi yang ditawarkan harus berbasis pada pilihan masyarakat;
 - c. Ukuran keberhasilan pemberdayaan, bukanlah ukuran yang “dibawa” oleh fasilitator atau berasal dari “luar”, tetapi berdasarkan ukuran-ukuran masyarakat sebagai penerima manfaatnya.
2. Pendekatan kesejahteraan;
3. Pendekatan pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa dalam pelaksanaan tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan membutuhkan peningkatan kapasitas, diri diantaranya :

- a. Rendahnya sumber daya manusia (SDM);
- b. Lemahnya pendampingan;

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan yang terjadi didalam tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan, keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran didalam pembangunan dapat terlihat dari keenganan masyarakat untuk bertani, karena menilai pertanian kurang menguntungkan, PPL kurang memberikan contoh sehingga masyarakat beranggapan PPL hanya menguasai teori kalau tidak dilakukan praktek lapangan.

PPL kesulitan mengumpulkan masyarakat/petani untuk melakukan kegiatan. PPL, mendapatkan lahan untuk pelaksanaan sekolah lapangan dan kurangnya permodalan untuk terlaksananya kegiatan.

Dalam meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengelolaan tanaman pertanian, Tidak adanya ikon desa yang menjadi motivasi masyarakat untuk bertani. PPL belum bisa merubah kebiasaan atau pola hidup masyarakat dan respon masyarakat dikarenakan keenganan masyarakat dalam mengolah tanaman pertanian, kurangnya PPL turun ke lapangan sehingga peningkatan wawasan masyarakat tidak berkelanjutan.

Dalam membantu masyarakat desa untuk mengoptimalkan lahan pekarangan untuk bercocok tanam, kurang rajinnya masyarakat dalam mengoptimalkan lahan pekarangan.

Menurut Prijono & Pranaka (Sulistiyani 2017:77-78) menyatakan bahwa :

Pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give ability to or enable.

Kebiasaan masyarakat Desa Buniseuri sebagai petani berbeda dengan daerah lain yang total segala keperluan hidupnya didapat dari hasil pertanian, itu disebabkan karena sebageian besar petani merupakan petani penggarap. Dalam transformasi pengetahuan masyarakat enggan mengelola lahan pertanian karena hasil yang didapatkan tidak menutupi biaya upah kerja.

Kesulitan mengumpulkan kelompok atau orang yang mau melaksanakan kegiatan, sulitnya mendapatkan lahan untuk pelaksanaan SL, sulitnya petani yang mau mengikuti rangkaian kegiatan SL dan kurangnya permodalan untuk menunjang terlaksananya kegiatan merupakan hambatan lain yang dialami PPL untuk memberikan keterampilan atau pengetahuan.

Dalam meningkatkan wawasan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pengelolaan tanaman pertanian, PPL mengalami hambatan dengan adanya respon petani/masyarakat yang kurang. Kerjasama antar instansi juga kurang, padahal pemberdayaan pertanian membutuhkan perhatian dari lintas sektor, kurangnya sarana prasarana pertanian kurang mendukung dan fasilitas di Kantor BPP untuk penyuluhan terbatas.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya hambatan yang terjadi didalam tahap peningkatan

kemampuan intelektual, kecakapan, keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian. Masyarakat cenderung memanfaatkan kelompok tani yang sudah ada. Kelompok tani mempunyai kebiasaan aktif kelompoknya apabila ada bantuan pemerintah. Pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya pembentukan kelompok tani tidak merata. Kurangnya minat petani untuk berkelompok dan kurangnya sosialisasi dari PPL dan pihak-pihak terkait menjadi masalah yang perlu diselesaikan.

Dalam memberikan keterampilan dalam pembuatan pupuk buatan untuk hasil pertanian yang lebih baik, dan berdasarkan hasil observasi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa PPL menemui hambatan yang dapat terlihat dari petani yang tidak mau repot dengan membuat pupuk organik dan kebanyakan petani kembali lagi ke pupuk kimia. Masyarakat belum sadar dengan pentingnya pupuk organik dan tidak memanfaatkan pupuk kandang sehingga kegiatan tidak berkelanjutan.

Selanjutnya Sutrisno (2005:17) dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah :

Mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan

dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa belum adanya pertemuan kelompok yang berkesinambungan, kelompok bersama PPL belum menyusun rencana kerja dan melakukan evaluasi secara partisipatif. Kelompok tani atau Gapoktan juga belum memiliki aturan yang disepakati bersama maupun memiliki pencatatan/pengadministrasian yang rapih. Kelompok tani juga belum menjadi sumber, serta pelayanan informasi dan teknologi untuk usaha para petani umumnya dan kelompok tani pada khususnya.

Untuk mengantisipasi kerusakan tanah yang diakibatkan oleh pemupukan kimia, petani tidak kreatif untuk membuat kompos atau pupuk organik lainnya atau memanfaatkan pupuk kandang yang bisa didapat di sekitar kelompok berada.

3. Upaya-upaya dari Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa adanya upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi didalam suatu Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh PPL antara lain sebagai berikut :

Prinsip utama dalam mengembangkankonsep pemberdayaan masyarakat menurut Sutrisno (2005:18) ada lima macam, yaitu:

1. Pendekatan dari bawah (bottom up approach):
2. Partisipasi (participation):
3. Konsep keberlanjutan:
4. Keterpaduan:
5. Keuntungan sosial dan ekonomi.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, PPL melalui kelompok tani di dusun atau disetiap kesempatan musyawarah berkoordinasi dengan dusun melalui RT/RW. Petani diberikan motivasi untuk memaksimalkan lahan pertanian dengan cara study banding ke petani atau kelompok lain. Untuk jangka lama penanaman pohon-pohon di lokasi mata air dan tentunya pembangunan sarana prasarana atau perbaikan saluran atau kirmir air.

Selain sawah petani dianjurkan untuk menanam pohon pisang untuk membantu ekonomi masyarakat karena hasil yang didapatkan dapat dijual ke pabrik-pabrik keripik. Dalam hal peningkatan SDM, petani yang usianya lanjut diberikan pelatihan penerapan teori dilakukan sangat sederhana. Pemberian teori secara detail diberikan kepada petani yang berusia muda. PPL mengupayakan untuk merekrut anak muda dalam wadah taruna tani.

Menurut Kartasmita (1995:19), upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara yaitu :

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan

sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah.

3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah.

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, PPL menggali potensi petani melalui praktek lapangan.

PPL dalam mengerjakan bidang pertanian di lapangan, PPL tidak hanya mengawasi atau melakukan pembinaan di satu hamparan bidang, tapi beberapa hamparan lain. Dengan cara turun langsung ke lapangan melalui praktek, PPL melakukan himbauan kepada masyarakat tentang tata cara pengelolaan lahan pertanian dengan cara tumpangsari, terutama penanaman pohon-pohon (pohon pisang) yang tidak memerlukan perawatan khusus.

Disamping melakukan penyuluhan kepada kelompok atau petani, PPL membuat kegiatan Sekolah Lapangan.

Dalam sosialisasi, PPL memberikan motivasi dan mengingatkan masyarakat mengenai tata cara pengelolaan lahan pertanian yang benar. PPL juga mengkoordinasikan dengan pihak-pihak terkait bahwa perlu adanya kerjasama saling mendukung antar lintas sektor. Kerjasama diperlukan untuk meringankan tugas yang ada.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat upaya yang dilakukan untuk dalam memberikan pemahaman mengenai terbentuknya kelompok tani

dan upaya PPL dalam memberikan keterampilan dalam pembuatan pupuk buatan untuk hasil pertanian yang lebih baik.

Menurut Wahab (2002: 81-82) ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam empowerment atau pemberdayaan yaitu:

1. The welfare approach,
2. The development approach,
3. The empowerment approach,

Dengan demikian berdasarkan hal tersebut di atas, PPL harus inovatif, mengajak kembali masyarakat lewat KWT dan memberikan semangat untuk membuat lagi kegiatan yang kontinyu.

Dalam hal menerima bantuan, bantuan harus jadi modal utama dan dikembangkan kepada petani lain dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pengorganisasian kelompok tani dengan struktur, aturan dan administrasinya.

PPL melakukan motivasi dan melihat peluang. Karena indikator keberhasilan PPL salah satunya terbentuknya kelompok tani.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Wilayah Binaan Desa Buniseuri Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis, maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh PPL dalam beberapa hal dirasa belum optimal, yaitu diantaranya PPL harus mengoptimalkan perannya sebagai

penyuluh untuk memberikan motivasi, merangsang, dan memperluas wawasan petani terhadap perkembangan dunia luar.

2. Mengenai hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh PPL, yaitu diantaranya lebih mengoptimalkan lagi peran dan fungsi PPL melalui kegiatan-kegiatan yang dikelola, dianggarkan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat dalam bidang pertanian.

Lahan pertanian (sawah) tadah hujan dan sarana prasarana pengairan yang belum memadai menjadikan Desa Buniseuri belum bisa mengoptimalkan lahan pertanian.

Indikator keberhasilan PPL salah satunya adalah adanya kelompok tani. Jadi adanya kelompok tani itu sangat penting untuk meringankan tugas PPL.

3. Mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ditemukan dalam Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pertanian oleh PPL.

Untuk mewujudkan pertanian yang tangguh diperlukan sumberdaya manusia berkualitas melalui penyuluhan pertanian dengan pendekatan kelompok yang mendukung sistem agribisnis berbasis pertanian (tanaman pangan, holtikultura, peternakan dan perkebunan).

Pembinaan kelompok tani diarahkan pada penerapan sistem agribisnis, peningkatan peranan, peran

serta petani dan anggota masyarakat lainnya, dengan menumbuhkembangkan kerja sama antar petani dan pihak lainnya yang terkait untuk mengembangkan usahatani.

Dalam melakukan pembinaan terhadap anggota kelompok tani, dapat dilakukan dengan melakukan tiga pendekatan yaitu pendekatan individu, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal dengan menggunakan beberapa kombinasi dari beberapa metode penyuluhan yang disesuaikan dengan karakteristik sasaran (Margono, 1989), sedangkan menurut Soekandar (1976) metode yang efektif digunakan dalam melakukan kegiatan penyuluhan adalah kombinasi dari beberapa metode, sehingga para petani mampu mengingat, mengerti dan melaksanakan inovasi yang diberikan oleh penyuluh karena sesuai dengan yang dibutuhkan.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa transfer teknologi tentang pembuatan kompos adalah sebagai upaya memanfaatkan potensi lingkungan sekitar berupa sisa sampah organik.

DAFTAR PUSTAKA

Setiawan, Danny. 2011. *Wajah Desa Kita-Dimensi SDM, Politik, Ekonomi*- Penerbit Pusat Kajian Pemberdayaan Desa.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2017. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*-Penerbit Penerbit Gaya Media.

Mardikanto, Totok & Soebianto, Poerwoko, 2017. *Pemberdayaan*

Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik-Penerbit Alfabeta, Bandung.

Anwas, Oos M., 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*-Penerbit Alfabeta, Bandung.

Soetriono & Suwandari. Anik. 2016, *Pengantar Ilmu Pertanian-Agraris Agribisnis Industri*-Penerbit Intimedia, Malang.

Sunarso, 2017. *Strategi Pembangunan Pertanian-yang visioner dan integrative-Deepublish* (Grup Penerbitan CV. BUDI UTAMA).

Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian*. Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.

Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.

Riduwan. 2013. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Satori Djam'an dan Aan Komariah. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Penerbit Alfabeta, Bandung.

Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Penerbit Refika Aditama. Bandung.

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2017. *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*. Penerbit Gaya Media.

Dokumen-Dokumen

Undang – Undang No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang – Undang No. 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Modul Pembekalan Bagi THL-TB
Penyuluhan Pertanian.
Depatemen Pertanian Badan
Pengembangan Sumberdaya
Manusia Pertanian.